

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MAKMUR KECAMATAN PALOLO KABUPATEN SIGI

Nur Afifah1)*, Abdul Rivai2), Muhammad Rapi3)

1 Prodi. Administrasi Publik Fisip, Universitas Tadulako

afifaahnr@gmail.com

2 Prodi. Administrasi Publik Fisip, Universitas Tadulako

abdrivai@gmail.com

3 Prodi. Administrasi Publik Fisip, Universitas Tadulako

muhrapi114@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Metode penelitian yang di gunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang di teliti di Desa Makmur. Sumber data yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, adapun analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi masih relatif rendah. Mulai dari penyusunan rencana rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan dapat dibuktikan berdasarkan daftar hadir, dan pada tahap pelaksanaan masyarakat juga kurang berpartisipasi karena menganggap sudah ada yang dipekerjakan dalam pembangunan tersebut. hal ini juga dikarenakan komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat kurang berjalan dengan baik dan juga masih kurangnya inisiatif masyarakat dalam memberikan sumbangan berupa tenaga dalam pelaksanaan pembangunan.

Kata Kunci : Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi.

ABSTRACT

The aim of this research is to describe community participation in development planning in Makmur Village, Palolo District, Sigi Regency. The research method used is a qualitative descriptive research method to provide a clear picture of the problems studied in Makmur Village. Data sources are primary and secondary data, data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation techniques, the informants in this study were 6 people, while the data analysis used was data collection, data condensation, data presentation and drawing conclusions. The research results show that community participation in development planning in Makmur Village, Palolo District, Sigi Regency is still relatively low. Starting from the preparation of the plan, the low level of community participation in participating in the Development Planning Conference was proven based on the attendance list, and at the implementation stage, the community also did not participate because they thought that someone was already employed in the construction. This is also because communication between village officials and the community is not going well and there is a lack of community initiative in providing contributions in the form of personnel in implementing development.

Keyword : *Preparation, Planning, Implementation, Supervision, Evaluation.*

Submisi: 21-07-2024

Diterima: 23-07-2024

Dipublikasikan: 30-08-2024

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap Negara yang sedang berkembang tentu pelaksanaan ini diarahkan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dengan kata lain bahwa pembangunan Indonesia bukan hanya ditujukan untuk kepentingan lahir dan batinnya tetapi pelaksanaan pembangunan dalam suatu Negara menjadi kewajiban yang dilakukan oleh suatu pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Hal ini searah dengan pendapat Sondang P. Siagian (2017:4) yang mengatakan, “pembangunan adalah rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan reposisi peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian hasil pembangunan desa. Masyarakat merupakan unsur pokok yang harus diperhatikan dalam setiap pembangunan, sebab pembangunan memerlukan keterlibatan orang atau masyarakat.

Perencanaan pembangunan dapat dikatakan baik apabila melibatkan seluruh komponen bangsa. Meskipun harus diakui, bahwa pemerintah memainkan peran yang dominan, tetapi partisipasi masyarakat juga memiliki peran yang sangat menentukan, terutama bila dikaitkan pada kenyataan bahwa tingkat kemakmuran, keadilan dan juga kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya bersifat relative dan bahkan tidak akan pernah dapat dicapai secara absolute. Hal ini sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SP2N) , dimana pola perencanaan pembangunan yang pada awalnya bersifat dari atas kebawah menjadi bottom up, yakni pelibatan masyarakat dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan sampai pada evaluasi pembangunan, sebab masyarakat bukan hanya sasaran atau objek yang akan dibangun tetapi juga sebagai pelaksana. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan.

Perencanaan adalah rangkaian kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1987:12). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi sangatlah penting guna membantu tercapainya program pembangunan. Sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat.

penulis menemukan permasalahan adanya tingkat partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa yang masih rendah. Hal ini ditujukan oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk memberikan kontribusinya, demikian halnya dapat dilihat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tentang perubahan RKPDes yang membahas perencanaan pembangunan tempat posyandu, masyarakat yang hadir sangat minim bahkan hanya unsur-unsur tertentu saja, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi tersebut pula berakibat pada pelaksanaan pembangunan desa. dan juga masih kurangnya

inisiatif memberikan sumbangan berupa keterampilan maupun tenaga dalam setiap pembangunan, karena kurangnya komunikasi yang terjalin antar pemerintah desa dan masyarakat desa makmur dan tidak sedikit masyarakat yang masih acuh tak acuh tentang persoalan pembangunan sehingga terjadilah kesenjangan yang membuat peran partisipasi masyarakat belum bisa dikatakan mencapai hasil yang maksimal.

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal. Sumaryadi (2005:46)

Menurut Fithriadi dkk (1997) dalam Sugandi (2011: 183) Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Dengan demikian, Abe 2005 (dalam Sugandi 2011:183) Mengasumsikan bahwa hal ini menyebabkan masyarakat telah terlatih secara baik. Tanpa adanya pra kondisi, dalam arti mengembangkan pendidikan politik maka keterlibatan masyarakat secara langsung tidak akan memberikan banyak arti.

Lebih lanjut Abe 2005 dalam Sugandi (2011:183) Mengemukakan, melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa dampak penting, yaitu: (1) Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat; (2) Memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan karena semakin jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik; dan (3) Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Mewujudkan partisipasi tersebut, pemerintah telah membentuk sebuah forum yang digunakan untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan, yang dikenal dengan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Sebagai mekanisme perencanaan partisipatif yang bersifat Bottom up planning. Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang sebuah usaha yang benar-benar menjadi sebuah wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat serta bagaimana pemerintah merespon semua masalah tersebut. Idealnya dalam pelaksanaan musrenbang dimulai dari satuan pemerintah yang paling bawah, yaitu tingkat kelurahan/desa dan kemudian secara hirarki naik keatas yaitu tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten/kota.

Fenomena-fenomena partisipasi masyarakat yang terjadi di Desa Makmur mengenai perencanaan pembangunan membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ilmiah yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi”. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi?

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Definisi konsep dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori perencanaan pembangunan oleh Bintoro Tjokroamidjojo terdiri atas penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan rencana, pengawasan atas pelaksanaan, evaluasi rencana. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu alat perekam dan pencatatan tertulis dari peneliti. Tahapan yang digunakan dalam analisis data menggunakan model analisis interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) dengan 4 tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah merupakan forum musyawarah tahunan yang di selenggarakan oleh pemerintah Desa Makmur bekerjasama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati rencana kerja dalam pelaksanaan pembangunan. Sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di laksanakan terlebih dahulu pelaksanaan pra musrenbang di tingkat Dusun atau RT dan merupakan kegiatan yang harus di laksanakan untuk mempersiapkan rencana usulan pembangunan yang akan di bahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang merupakan sebuah strategi pemerintah dalam perencanaan pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di wilayah mereka. Pemerintah tidak lagi melaksanakan pembangunan yang berpola top down dengan mobilisasi masyarakat. Pembangunan yang di laksanakan pemerintah berdasarkan partisipasi masyarakat melalui aspirasi yang di berikan dalam wadah Musrenbangdes.

Pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah *Bottom Up* dengan melibatkan masyarakat secara aktif di laksanakan dari dan bersama masyarakat dengan koordinasi antara sektor serta kelembagaan yang ada di desa. Melalui proses semacam ini maka keinginan-keinginan dan kebutuhan masyarakat dapat di salurkan dan di wujudkan dalam program pembangunan.

Konsep itu sesuai dengan tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara daerah, fungsi pembangunan pusat dan daerah serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan sekarang ini pemerintah melibatkan langsung masyarakat dengan cara menyaring aspirasi masyarakat dari bawah dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan di daerah mereka melalui Musrenbangdes.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah melalui Musrenbang di mulai dengan Musrenbangdes, karena dalam melakukan perencanaan pembangunan tersebut di mulai melalui pemerintah paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yaitu pemerintah kelurahan/desa dengan mengikut sertakan masyarakat secara aktif untuk menentukan prioritas pembangunan yang ada di lingkungan mereka.

Adanya partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes, perencanaan pembangunan menjadi lebih terarah artinya rencana atau program pembangunan yang di susun itu adalah sesuai dengan yang di butuhkan masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana program pembangunan yang dilakukan penentuan prioritas. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa makmur kecamatan palolo kabupaten sigi untuk itu penulis menerapkan lima indikator perencanaan pembangunan yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1996:57-60) yaitu penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan rencana, pengawasan atas pelaksanaan, evaluasi rencana.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pada indikator penyusunan rencana, partisipasi masyarakat pada saat menghadiri rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) masih rendah, berdasarkan penelusuran dokumen menunjukkan bahwa masyarakat yang hadir hanya 23 orang dari total undangan yang disebar 50 undangan hal ini dapat di buktikan berdasarkan daftar hadir, dimana salah satu alasan yang membuat masyarakat tidak menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan tersebut karena tidak mendapat undangan dari pemerintah desa.

Aspek penyusunan program rencana, sebagai suatu upaya penyusunan program rencana, terutama dalam konteks manajerial atau organisasi, melibatkan beberapa aspek penting. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, proses penyusunan program rencana dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan efektif, meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa Makmur telah melibatkan masyarakat, sebelum penyusunan program di jaring dahulu aspirasi dari masyarakat kemudian dimasukkan dalam daftar usulan yang mana paling mendesak itu terlebih dahulu dikerjakan oleh pemerintah.

Aspek pelaksanaan rencana, sebagai suatu pelaksanaan rencana yang di mana tahap tersebut bagian dari strategi yang telah dirancang diimplementasikan dalam praktik. Dengan mengelola aspek-aspek ini dengan baik, pelaksanaan rencana dapat dilakukan secara efektif dan efisien, meminimalkan risiko kegagalan, dan meningkatkan peluang pencapaian tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, kendala tersebut membuat masyarakat kurang berpartisipasi memberikan sumbangan seperti tenaga karena menganggap sudah ada yang dikerjakan dalam hal tersebut.

Aspek pengawasan atas pelaksanaan, sebagai tindakan dalam pengawasan atas pelaksanaan rencana adalah aspek krusial untuk memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian, hal tersebut sudah berjalan sesuai dengan perencanaan, dimana pembangunan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, pengawasan atas pelaksanaan dapat dilakukan dengan efektif, membantu memastikan bahwa rencana dilaksanakan dengan baik dan bahwa hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan.

Aspek evaluasi, Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah proses untuk menilai efektivitas dan dampak dari kegiatan perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten/kota. Musrenbang bertujuan untuk merancang dan menyepakati rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dengan cara meninjau langsung. Evaluasi Musrenbang yang komprehensif membantu memastikan bahwa proses

perencanaan pembangunan dilakukan dengan baik, program yang dihasilkan relevan dan efektif, serta manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

SIMPULAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi masih rendah. pada penyusunan rencana tingkat partisipasi masyarakat masih rendah untuk hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan dapat dibuktikan berdasarkan daftar hadir rapat tersebut, dan pada tahap pelaksanaan masyarakat juga rendah berpartisipasi karena menganggap suda ada yang dipekerjakan dalam pembangunan tersebut. Maka, penulis mengambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah, hal ini juga dikarenakan komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat kurang berjalan dengan baik dan juga masih kurangnya inisiatif masyarakat dalam memberikan sumbangan berupa tenaga dalam pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Tjoakromidjojo, Bintoro. 1987. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung

Siagian, S.P. 2017. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta. PT Bumi aksara

Sugandi, Suprayogi Yogi. 2011. Administrasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Samarinda: Citra Utama

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan 2 pendekatan, yaitu desa membangun dan membangun desa yang terdapat pada Pasal 78 Tahun 2014.

TENTANG PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Nur Afifah
 No. Stambuk : B 101 20 199
 Tempat dan Tanggal Lahir : Makmur, 8 Januari 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Lando Kalukubula
 Telp/Faks : -
 Alamat Email : Ilamikayla08@gmail.com



B. Identitas Orang Tua

Nama Orang Tua :
 Ayah : Budi Utomo Dg. Palawa
 Ibu : Hamdana

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah
2014	SD	SDN Menusi
2017	SMP	SMPN 7 SIGI
2020	SMA	SMAN 6 SIGI